

## [Kiai Sangidu, Sang Penghulu Reformis](#)

Ditulis oleh Mu'arif pada Minggu, 17 Juni 2018



Sewaktu Hanung Bramantyo menyusun skenario film *Sang Pencerah*, beberapa sesepuh Kauman dikumpulkan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jalan K.H.A. Dahlan untuk menyelidiki karakter beberapa tokoh yang sedianya akan ditampilkan dalam film tersebut. Penulis menjadi salah satu narasumber yang memberikan informasi seputar karakter Haji Fachroedin dan Haji Syujak. Ketika memasuki pembahasan konflik antara K.H. Ahmad Dahlan dan *Hoofdpenghulu* Kraton Yogyakarta, beberapa narasumber mulai saling lempar dugaan. Para narasumber mulai kesulitan untuk mengidentifikasi karakter *Hoofdpenghulu* Kraton yang bernama Kamaludiningrat. Sebagian narasumber menilai *Hoofdpenghulu* Kamaludiningrat adalah musuh bebuyutan K.H. Ahmad Dahlan. Tetapi sebagian lagi menganggap *Hoofdpenghulu* ini sebagai kawan seperjuangan K.H. Ahmad Dahlan. Dalam kondisi seperti itu, kita perlu menengok kembali sejarah Kepenghuluan Kraton Yogyakarta, agar pemahaman kita tidak *a-historis*.

## **Kepenghuluan**

Sejarah lembaga Kepenghuluan Kraton Yogyakarta tidak lepas dari sejarah berdiri Masjid *Gedhe*. Adapun sejarah Masjid *Gedhe* tak bisa lepas dari sejarah berdiri Kerajaan Mataram. Pasca *Perjanjian Giyanti* (13 Februari 1755), Pangeran Mangkubumi bergelar Sultan Hamengku Buwono I mendirikan kerajaan di Yogyakarta (M.C. Riklefs, 2005: 98-99). Setelah kerajaan Yogyakarta didirikan, Masjid *Gedhe* dibangun di muka kraton, tepatnya di sebelah barat Alun-alun Utara. Masjid *Gedhe* didirikan pada tanggal 29 Mei 1773. Sang arsitek pembangunan Masjid *Gedhe* adalah Kanjeng Wirjakusuma di bawah pengawasan Penghulu Kraton, Kiai Faqih Ibrahim Dipaningrat (Ahmad Adaby Darban, 2000: 9).

Pengelolaan Masjid *Gedhe* diserahkan kepada sekelompok ulama kraton. Mereka yang bertugas mengurus masjid gedhe bermukim di sekitar masjid. Pemukiman para ulama yang mengurus masjid inilah yang kemudian tumbuh menjadi sebuah komunitas sosial tertentu. Komunitas sosial yang terbentuk di sekeliling Masjid *Gedhe* saling terikat berdasarkan status sosial, agama (Islam), dan pertalian darah (Darban, 2000: 16-19).

Pemukinan di sekitar Masjid *Gedhe* inilah yang kemudian dikenal dengan nama "Kauman." Nama "Kauman" sendiri berasal dari kata Arab, "*qaum*", yang berarti sekelompok orang atau kumpulan warga. Istilah "kaum" yang berasal dari kata Arab (*qaum*) memang identik dengan agama Islam. Kampung ini memang tempat pemukiman para kaum (*qaum*), yaitu orang-orang yang taat menjalankan agama Islam dan mendapat tugas untuk mengurus berbagai aktivitas di Masjid *Gedhe* Yogyakarta.

Letak kampung Kauman di sebelah barat, di sekitar Masjid *Gedhe*. Masjid ini milik kraton

yang dikelola oleh para takmir yang seluruh aktivitasnya dipusatkan di kantor Penghulu. Letak kantor Penghulu di sebelah utara Masjid *Gedhe*, dengan pintu menghadap ke selatan (halaman masjid). Dalam tradisi Jawa Islam, khususnya masyarakat Kauman, kantor penghulu disebut *Pengulon*.

Lembaga Kepenghulan dipimpin oleh seorang Kepala Penghulu (*Hoofdpenghulu*). Adapun staf Kepenghulan dinamakan *abdi dalem pamethakan* (*abdi dalem putihan*). Fungsi lembaga Kepenghulan mengurus administrasi keagamaan, meliputi: *pernikahan, perceraian, rujuk, juru kunci makam, naib, hukum dalem peradilan agama, dan kemasjidan*.

Baca juga: Cara Gus Dur Berpakaian

Struktur lembaga Kepenghulan Masjid *Gedhe* meliputi: *Penghulu, Ketib* (Khatib), *Modin, Berjamaah*, dan *Merbot*. Kepala Penghulu adalah jabatan tertinggi dalam struktur Kepenghulan. Di bawah jabatan Kepala Penghulu adalah *Ketib, Modin, Berjamaah*, dan *Merbot*. Jumlah Khatib terdiri atas sembilan orang, yang meliputi: *Ketib Anom, Ketib Tengah, Ketib Kulon, Ketib Wetan (Tibetan), Ketib Lor (Tibelor), Ketib Senemi, Khatib Amin (Tibamin), Ketib Iman (Tibiman)*, dan *Ketib Cendana*. Ketib Anom adalah Wakil Kepala Penghulu. Masing-masing Ketib memiliki bawahan. Ketib bertugas sebagai imam dan khatib di Masjid *Gedhe* (Darban, 2000: 11-12).

Pada akhir abad ke-19, jabatan *Hoofdpenghulu* dipegang oleh Kiyai Mohammad Khalil Kamaludiningrat. Selaku Khatib Amin masjid Kauman Yogyakarta dipercayakan kepada K.H. Abubakar bin K.H. Sulaiman (Junus Salam, 2009: 54). Pada tahun 1896, K.H. Abubakar wafat, meninggalkan tujuh anak, dua laki-laki dan lima perempuan. Putra-putri K.H. Abubakar adalah: Nyai Chatib Arum, Nyai Muhsinah (Nyai Nur), Nyai Saleh, Mohammad Darwis (K.H. Ahmad Dahlan), Nyai Abdurrahman, Nyai Mohammad Fakhir (Ibu H. Ahmad Badawi), dan Mohammad Basir. Jabatan Khatib Amin dilimpahkan kepada salah seorang putra tertuanya yang bernama K.H. Ahmad Dahlan.

K.H. Ahmad Dahlan, Khatib Amin Masjid *Gedhe* Kauman, lahir pada tahun 1868 M (Salam, 2009: 56; Tamar Djaja, 1966: 635). Dia lahir dengan nama kecil Mohammad Darwis. K.H. Ahmad Dahlan menjabat sebagai Khatib Amin di Masjid *Gedhe* Yogyakarta pada tahun 1896, menggantikan K.H. Abubakar, yang telah meninggal dunia pada tahun itu juga. Setahun pasca menyandang gelar Khatib Amin (1897), K.H. Ahmad Dahlan

membuat geger para ulama kraton. Dengan keyakinan yang teguh, Khatib Amin mengusulkan pembetulan arah kiblat. Menurutnya, arah kiblat Masjid Besar Kauman telah melenceng di sebelah utara garis katulistiwa di antara 24 derajat. Untuk menyadarkan umat Islam atas kesalahan arah kiblat Masjid *Gedhe*, Khatib Amin menggunakan cara yang santun dan beradab. Dia mengundang para ulama kraton dan sesepuh Kauman di suraunya, mendiskusikan persoalan kontroversi arah kiblat secara jernih. Kiai Syujak, salah seorang murid Khatib Amin, mencatat peristiwa ini terjadi pada tahun 1897 (Kyai Syujak, 2009: 37-39).

Beberapa hari pasca musyawarah dengan para ulama Kraton Yogyakarta, kampung Kauman dibuat geger. Pasalnya, arah kiblat Masjid *Gedhe* telah digeser. Dengan cara memberikan tanda garis shaf shalat seukuran 5 cm dari arah selatan ke utara, arah kiblat dibuat agak serong ke arah barat laut. Peristiwa ini terjadi pasca musyawarah para ulama dan sesepuh Kauman yang diundang oleh Khatib Amin di suraunya. Pasca peristiwa inilah, Khatib Amin mendapat kecaman keras dari para ulama senior kraton. Dia dianggap telah mengubah dasar-dasar agama. Para ulama kraton merasa tertampar, terutama Mohammad Khalil Kamaludiningrat (Deliar Noer, 1996: 85), karena sikap dan perbuatan Khatib Amin dianggap mendahului otoritasnya.

Baca juga: Melihat Mahbub DJunaidi dengan Mata Max Weber

Kiai Penghulu marah dan meminta supaya dicari pelakunya. Dia memutuskan untuk memanggil Khatib Amin, karena teringat akan gagasan yang pernah diajukannya seputar pembetulan arah kiblat. Puncak konflik antara Khatib Amin dengan para ulama dan penguasa kraton Yogyakarta ketika suraunya dirobuhkan. Inilah bibit pertengkaran antara K.H. Ahmad Dahlan dengan *Hoofdpenghulu* Kraton Yogyakarta.

Pada tahun 1914 (Darban, 2000: 41-43), Mohammad Khalil Kamaludiningrat meninggal dunia, sehingga jabatan *Hoofdpenghulu* dilimpahkan kepada Khatib Anom. Posisi Khatib Anom pada waktu itu dijabat oleh Kiai Sangidu. Setelah diangkat sebagai *Hoofdpenghulu*, Kiai Sangidu menyandang nama atau gelar Mohammad Kamaludiningrat.

Dari sini telah jelas siapa tokoh yang berperan antagonis dan siapa yang protagonis terhadap gerakan K.H. Ahmad Dahlan sekalipun sama-sama memiliki nama atau gelar "Kamaludiningrat." *Hoofdpenghulu* Mohammad Khalil Kamaludiningrat inilah yang dikenal sebagai musuh bebuyutan K.H. Ahmad Dahlan, sementara Mohammad

Kamaludiningrat (Kiai Sangidu) dikenal sebagai kawan seperjuangan pendiri Muhammadiyah ini.

## Kiai Sangidu

Dua nama Kamaludiningrat, tetapi masing-masing memiliki karakter yang berbeda, pada masa kehidupan K.H. Ahmad Dahlan. Kamaludiningrat yang pertama adalah *Hoofdpenghulu* Mohammad Khalil yang pernah menghambat usaha K.H. Ahmad Dahlan dalam proses pengajuan *rechtpersoon* Muhammadiyah (1912). Kamaludiningrat yang kedua adalah Kiai Sangidu, kawan seperjuangan K.H. Ahmad Dahlan yang sebelumnya menjabat sebagai Khatib Anom.

Kiai Sangidu menikah dengan putri *Hoofdpenghulu* Mohammad Khalil Kamaludiningrat mendapatkan tiga anak: K.H. Djalal, Siti Salmah, dan Nafiah (*Suara Muhammadiyah*, no. 14/Th. Ke-52/1972). Setelah putri *Hoofdpenghulu* Mohammad Khalil Kamaludiningrat wafat, Kiai Sangidu menikah lagi dengan Siti Djauharijah, putri K.H. Saleh (kakak ipar K.H. Ahmad Dahlan). Pernikahan Kiai Sangidu dengan Djauharijah melahirkan Siti Umniyah, salah satu pendiri Nasyi'atul 'Aisyiyah (dulu *Siswo Proyo Wanito*).

Ketika ayah kandung Kiai Sangidu wafat, K.H. Ahmad Dahlan menikahi mantan jandanya, sehingga hubungan kekeluargaan semakin dekat. Kiai Sangidu merupakan ulama reformis yang sejak awal mendukung gerakan K.H. Ahmad Dahlan (Khatib Amin). Meskipun mertua Kiai Sangidu sangat memusuhi gerakan yang dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan, tetapi dia tetap mendukung berdirinya Muhammadiyah. Dalam *Stamboek* Muhammadiyah 1912, nama Kiai Sangidu tercatat sebagai anggota nomor perdana.

Sebuah kisah yang cukup masyhur di kalangan Muhammadiyah, tetapi sangat membingungkan bagi yang tidak memiliki dan menguasai literatur-literatur sejarah ini. Dikisahkan, Khatib Amin pernah memerintahkan penyelidikan dengan metode *ru'yah bil ain*. Ternyata, hasil dari perhitungan awal bulan dengan metode *hisab* dan *ru'yah bil ain* tidak berbeda. Tetapi, hasil perhitungan dengan metode *hisab* dan *ru'yah bil ain* menurut keputusan Muhammadiyah berbeda dengan kebijakan kraton yang masih menggunakan kalender *Aboge*. Dengan keyakinan membawa kebenaran agama Islam, Khatib Amin memberanikan diri menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono VII untuk menyampaikan informasi ini. Mendengar seorang *abdi dalem* menyampaikan kebenaran agama, sang raja Yogyakarta bersikap sangat bijaksana. "*Berlebaranlah kamu menurut hisab atau rukyat, sedang Grebeg di Yogyakarta tetap bertradisi menurut hitungan Aboge*", demikian jawab Sultan Hamengku Buwono VII kepada Khatib Amin (Junus Salam, 2009: 156-157).

Baca juga: Kedekatan Imam as-Syafi'i dan Sayidah Nafisah

Kisah ini memang masyhur di kalangan warga Muhammadiyah, tetapi hampir tidak ditemukan kejelasan bagaimana seorang pejabat rendahan di dalam struktur pemerintahan Kraton Yogyakarta bisa melakukan reformasi keagamaan secara struktural. Kapan peristiwa ini terjadi juga tidak banyak buku yang menjelaskannya. Sebagai seorang Khatib, jabatan K.H. Ahmad Dahlan jelas berada di bawah *Hoofdpenghulu* dalam struktur lembaga Kepenghuluan Yogyakarta. Khatib Amin tidak mungkin bisa masuk ke dalam kraton bertemu langsung dengan sang raja tanpa melewati otoritas *Hoofdpenghulu*. Siapakah *Hoofdpenghulu* pada waktu K.H. Ahmad Dahlan menghadap Sang Raja dalam kisah ini?

Jika tidak hati-hati membaca literatur sejarah, para pembaca pasti bakal terjebak pada dua tokoh Kamaludiningrat sebagaimana Hanung Bramantyo sewaktu membuat skenario film *Sang Pencerah*.

Sekali lagi, ada dua Kamaludiningrat. Yang pertama adalah *Hoofdpenghulu* Mohammad Khalil dan yang kedua adalah *Hoofdpenghulu* Mohammad (Kiai Sangidu). *Hoofdpenghulu* Mohammad Khalil Kamaludiningrat adalah musuh bebuyutan K.H. Ahmad Dahlan yang meninggal pada tahun 1914. *Hoofdpenghulu* Mohammad Kamaludiningrat adalah Kiai Sangidu, kawan seperjuangan K.H. Ahmad Dahlan.

Dengan demikian, sangat tidak mungkin K.H. Ahmad Dahlan menghadap Sang Raja dalam rangka mengajukan gagasan pembaruan di bawah otoritas *Hoofdpenghulu* Mohammad Khalil Kamaludiningrat. Yang paling mungkin adalah ketika jabatan *Hoofdpenghulu* sudah beralih ke tangan Kiai Sangidu. Dengan demikian, peristiwa ini terjadi pasca tahun 1914, setelah jabatan *Hoofdpenghulu* dipegang oleh Kiai Sangidu.

Lewat dukungan Kiai Sangidu, K.H. Ahmad Dahlan memang berhasil melakukan reformasi keagamaan di lembaga Kepenghuluan Kraton Yogyakarta. Sejak K.H. Sangidu menjabat sebagai *Hoofdpenghulu*, K.H. Ahmad Dahlan bekerjasama dengan lembaga Kepenghuluan kraton Yogyakarta dan Pakualaman. *Hoofdpenghulu* Muhammad Kamaludiningrat sangat kooperatif dengan gerakan Muhammadiyah. Khatib Amin juga membuka kembali jalan permusyawaratan para ulama yang sudah hilang. *Musyawaratul Ulama* di Pakualaman yang dipimpin K.H. Abdulah Siraj juga merupakan *partner* Muhammadiyah dalam memutuskan berbagai persoalan keagamaan.

Terhitung sejak tahun 1914, pasca peralihan jabatan *Hoofdpenghulu* dari Mohammad Khalil Kamaludiningrat kepada Mohammad Kamaludiningrat, gerakan Muhammadiyah mulai memasuki Bangsal Priyayi, karena kantor Penghulu sudah bisa dipergunakan sebagai wadah tabligh atas izin Kiai Sangidu. Sebelumnya, Bangsal Priyayi adalah tempat yang tabu bagi masyarakat awam. Tetapi, setelah jabatan Kepala Penghulu dipegang oleh Kiai Sangidu, Bangsal Priyayi menjadi tempat penggemblengan kader-kader muballigh Muhammadiyah.